

diverifikasi jika pemerintah tidak mengehendaki preseden buruk penegakan hak kebebasan berserikat dan berkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Aminuddin Ilmar, Cet. Ke-3, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta.

A Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Bachtiar. 2018. *Metode penelitian Hukum*, Unpam Press. Tangerang.

Bagir Manan. 2006. *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press. Jakarta.

Dede Kania. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam Realita Global*. Manggu Makmur Tanjung Lestari. Bandung.

Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Malang.

Indroharto. 2002. *Usaha memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Irwansyah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

----- 2010. *Perihal Undang-Undang*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafaat. 2011. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.

Majda el Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2007*. Edisi Kedua-Cet. 5. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mirza Satria Buana. 2010. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Muhammad Ashri. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*. CV.Social Politic Genius. Makassar.
- Muhammad Muhsin Rodhi. 2012. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*. Al-Azhar Fresh Zone Publishing. Bogor.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Kencana. Jakarta.
- Rhona K.M. Smith *et al.* 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia Cetakan Pertama*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta.
- R.M. A.B. Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Saifuddin. 2012. *Khilafah Vis a Vis Nation State: Telaah Atas Pemikiran Politik HTI*. Mahameru. Yogyakarta.
- Suparman Marzuki. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta. Yogyakarta,

Yahya A.R.. 2008. *Struktur negara khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*. HTI Press. Jakarta.

II. Jurnal

Achmad Edi Subiyanto. "Menguji Konstitusionalitas peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Lex Jurnalica, Vol. 11 Tahun 2014.

Ahmad Furqon, "Civil Society *Vis a Vis* Masyarakat Madani" Jurnal Pemikiran Islam, Vol 1 Tahun 2022.

Asror Nawawi, "*Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM di Indonesia*", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11 Tahun 2017.

Catur Wibowo dan Herman Harefa, "Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah", Jurnal Bina Praja, Maret 2015.

Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". Jurnal Konstitusi, Vol. 10. Nomor 2 Juni 2013.

Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia", Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 15 Tahun 2018.

Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Tahun 2017.

Hendrawan, "Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional", Halu Oleo Law Review, Vol. 2 Tahun 2018.

Ismail Ramadhan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi terwujudnya Perdamaian", Jurnal RechtsVinding, Vol. 6, April 2017.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7. Tahun 2020.

Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", Jurnal Konstitusi, Vol. 4 Juni 2011.

- Mario Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 01 Tahun 2019.
- Masdar Hilmy, "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia", Jurnal Islamica, Vol. 6, September 2011.
- Mohammad Jatim dan Levina Yustitiningtyas, "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Asas *Contrarius Actus*", Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 6 Tahun 2021.
- Mohammad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir *Vis a Vis* NU)", Jurnal islamuna, Vol. 2 Tahun 2015.
- Muhammad Amin Putra, "Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia", Fiat Justitia, Vol. 9 Tahun 2015.
- Muhammad Syarif Nuh, "Hakikat Keadaan Darurat Negara (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 18 Tahun 2011.
- Nilda Hayati, "*Konsep Khilafah Islamiyah* Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian *Living al-Qur'an* Perspektif Komunikasi)", Jurnal Episteme, Vol. 12 Tahun 2017.
- Oom Komala Sandy, "Etnonasionalisme Paguyuban Pasundan dalam Asas Tunggal Pancasila 1980-1990 (Dari Pergerakan Politik ke Sosial Budaya)", Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 6 Tahun 2018.
- Ratna Kumalasari dan Sapto Budoyo, "*Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum di Indonesia*", Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 2 Tahun 2019.
- R. Herlambang Perdana Wiratman, "Kebebasan Berekspresi, Penelusuran Pemikiran dalam Konstitusi di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 6 Tahun 2009.
- Shandi Patria Airlangga, "Hakikat penguasa dalam Negara Hukum Demokratis", Jurnal Capelo, Vol. 3. Tahun 2019.

Suparman Marzuki, "Gerakan Menuju Masyarakat Sipil: Membaca Gerakan Bantuan Hukum LBH", *Jurnal Hukum*, Nomor 17 Vol. 8 Tahun 2001.

----- "Politik hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde baru", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 tahun 2019.

Veronica Agnes Sianipar, (dkk.), "Tinjauan yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Journal Lentera Hukum*, April 2014.

Victor Imanuel Nalle, "Asas Contrarius Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Tahun 2017.

Yeni Handayani, "*Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat*", *Jurnal Rechtsvinding*, Tahun 2014.

Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 Tahun 2007.

III. Makalah

Gita Ramaida Hamada. 2019. *Dinamika Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Makalah. Digital Library Sunan Gunung Djati. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.

IV. Ceramah

Moh. Mahfud MD. *Negara hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah*. Konferensi dan Dialog Nasional. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Keempat UUD 1945*. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Hukum Berkelanjutan. Denpasar.

V. Tesis

Mirza Satria Buana. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

VI. Kamus

David Moeljadi *et al.* Apk. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V 0.5.0. Beta (40)*. Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

VII. Berita Online, Artikel & Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt595cb74e1f3fe/berbincang-seputar-seluk-beluk-perppu-dengan-daniel-yusmic/> diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmukini/> diakses pada 6 April 2021.

<https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 27 desember 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a860340566c/sejarah-munculnya-istilah-perppu-dan-cermin-subjektivitas-presiden/> diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumham-cabut-status-badan-hukum-hti-lt596f08d298b25> diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

<https://www.mkri.id/index.hp?page=web.Berita&id=14364> diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

<https://tirto.id/sejarah-dan-penerapan-pancasila-masa-orde-baru-soeharto-1966-1998-ghNK> diakses pada tanggal 26 Juni 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia> diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas> diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

<https://www.pshk.or.id/blog-id/sengkarut-hukum-pembubaran-ormas/> diakses pada tanggal 27 juni 2022.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia

<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ormas-riwayatmu-kini--hol19452?page=1>

VIII. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 15 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2017

PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan Presiden tentang Rencana Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 1998-2003.